

FOKUS PERHATIAN

KERAS, KASAR, DAN BERINGAS

Oleh : Aswino.

VISI DAN PREDIKSI (Mantan) Kapolda Metro Jaya atas riak-riak gelombang perkelahian antar sekolah/pelajar di Ibukota tahun 1988 masih segar dalam ingatan sebagaimana dalam pernyataan formalnya tanggal 14-12-1988 yang berbunyi: "Tanggung jawab kita bersama karena perkelahian antar pelajar di Ibukota sudah melewati batas toleransi". Visi dan prediksi Mayjen Pol. Drs. H. Poedy Sjamsoedin tersebut terealisasi dalam keberhasilan Operasi "Wiyata Mandala" dengan bantuan penuh aparat Kanwil Depdikbud DKI yang berakhir pada tanggal 28 Pebruari 1989. Sementara itu letupan kasus-kasus pembunuhan serta tindak pidana kekerasan dengan modus-modus operandi canggih pun sempat membuat "mbregidik/merinding" (bulu kuduk berdiri), terutama sejak musibah atas diri Nyonya Dietje Moeljono. Dan tidak kalah canggihnya adalah tingkah laku "raja-raga jalanan" dengan segala kebrutalan dan keberingasannya yang membuat warga kota umumnya, terutama pejalan kaki (pedestrian), ngeri dan terpaksa mengalah.

Belum lagi setahun pernyataan

itu berlalu ternyata segala kengerian tadi telah muncul kembali dalam kualitas yang cenderung meningkat. Gelombang perkelahian pun tidak hanya terjadi di lingkungan pelajar tetapi juga mahasiswa. Khusus tentang perkelahian ini tidak kurang dari lima Pejabat Tinggi angkat bicara sesuai Upacara HUT ABRI ke-44 di Senayan (Kompas, 7 Oktober 1989). Mendikbud menyatakan bahwa cara kekerasan tidak bisa dibenarkan. Pangab analoog dengan Mendikbud memberikan penekanan: "Jika menimbulkan kerusakan tentunya mereka yang terlibat dalam perkelahian harus mengganti rugi, sedangkan jika mengakibatkan jatuhnya korban, mereka harus dihukum". Sementara itu Kapolri secara tandas menyatakan keprihatinannya, bahwa perkelahian telah menunjukkan gejala brutalisme yang arahnya semakin jelas kepada tindak kriminal, sehingga tidak bisa lagi diberikan toleransi. Selanjutnya dikatakan bahwa pembakaran, pengrusakan bahkan pembunuhan sudah betul-betul melanggar hukum padahal Polri sudah melakukan berbagai ceramah dan penyuluhan dalam rangka Bimbingan Masyarakat. Pangdam Jaya Mayjen TNI Suryadi Sudirdja dan Kapolda Me-

*) Aswino, Staf Redaksi "Bhayangkara", Pendidik, dan Pengamat masalah Sosbud.

tro Jaya Mayjen Pol. Drs. M.H. Ritonga dalam nuansa yang berbeda telah menggariskan arah kebijaksanaan demi tegaknya stabilitas Kamtibmas yakni persuasif, preventif, pre-emptif (tindakan lebih keras), serta represif.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa setiap warganegara mengidamkan Kamtibmas yang stabil/mantap, yang tata-tenteram-kerta-raharja; yang di dalamnya harkat martabat manusia dihargai secara selaras-serasi-seimbang. Oleh sebab itu seluruh unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu mawas ke dalam, sudahkan masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Tidak hanya Remaja saja yang harus dibenahi, akan tetapi juga Orang Tua, Guru/Pembina Sekolah, serta Lingkungan yang mengelola aspek kesejahteraan dan keamanan. Dan sesuai dengan sifat modernisasi yang begitu cepat prosesnya maka berbagai unsur yang berkembangpun dapat menjadi faktor penentu yang perlu diperhatikan serta dimanfaatkan kegunaannya bagi masyarakat luas, misalnya pendaya gunaan mobilitas industri automotive serta alat-alat komunikasi elektronika dan komputer.

PENDIDIKAN

Berdasarkan Pola Umum Pelita V maka tujuan pertama Pembangunan Nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat

yang makin merata dan adil. Sementara itu bertumpu pada Arah Kebijaksanaan Pembangunan sub-bidang Pendidikan maka pada butir a disebutkan: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan dari rumusan itu lahirlah tujuan Pendidikan nasional 1989, yang lebih numeralitatif namun tidak selugas tahun 1954 yang berbunyi: Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah membentuk *manusia susila yang cakap* dan warga negara yang *demokratis* serta *bertanggung jawab* atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Rumusan 1954 itu begitu sederhana sehingga dengan mudah menyentuh serta dijiwai oleh semua pihak yang merasa berkepentingan dengan pendidikan dan pengajaran, khususnya Siswa, Orang tua, dan Guru. Sampai awal tahun 60-an "vonis tidak naik kelas/tidak lulus karena KELAKUAN/BUDI PEKERTI" dapat melembaga tanpa menimbulkan protes, terutama karena semua pihak menjunjung tinggi harkat dan mar-

tabat MENTAL/MORAL/KESUSILAAN. Apa yang berkembang kemudian sama-sama kita rasakan yakni adanya kecenderungan kompromi antara "yang tersurat" dengan "uang/materi sebagai faktor penentu vonis". Uang dan materi telah menggeser kedudukan apa "yang tersurat" dalam rumusan tadi. Dan karena pihak Siswa/Mahasiswa dan Orang tua "sudah merasa membayar" maka menaati aturan adalah nomor dua, yang tragisnya martabat Guru jatuh merosot oleh citra bahwa mereka "bisa dibeli". Sementara itu Guru profesional yang berdedikasi sekalipun dalam kondisi terpojok oleh citra plus ulah oknum sesama Guru lain tanpa pengayoman Atasan/Kanwil Depdikbud secara nyata seperti sekarang ini tidak akan berdaya menegakkan aturan dalam mengelola dunianya secara seksama sebagaimana mestinya. Tragis, masyarakat Pancasila kita baru di bibir belaka dalam menghargai Guru sang Pencerdas bangsa dan masa depannya. Padahal sesama Bangsa Timur seperti Jepang, Korea, Cina, negara-negara ASEAN, dan India penghargaan dan rasa hormat kepada Guru itu jauh lebih mendalam daripada di Indonesia sebelum tahun limapuluhan sekalipun. Di India, guru disebut "dwija" (orang yang lahir dua kali) karena sifat superioritasnya. Maka itu seyogyanyalah ABRI juga mawas ke dalam: sudahkah cukup menghargai mereka yang berhak memperoleh Satya-

lencana "Dwija Sista" (bukan "Dwidya Sista" sebagaimana telanjur salah kaprah disebutkan), apalagi yang lebih dari 2 kali. Kita mengenal budaya *kualat* manakala kita durhaka kepada orang tua-tua. Orang tua dan Guru di negara Jepang yang "adi daya" pun tetap dihormati dan dimuliakan. Apakah di Indonesia yang "sedang berkembang" ini kita tidak harus segera "banting setir" lebih menghormati/memuliakan Guru-guru kita agar tidak *kualat*? Para Guru bukanlah pembantu rumah tangga atau "baby sitter", bukan?

Kembali kepada pernyataan Mayjen Pol. Drs. H. Poedy Syamsudin yang kini menjabat Irjen Polri yang mengemukakan bahwa "perkelahian antar pelajar adalah tanggung jawab kita bersama", maka jelas bahwa penanganannya bukan urusan Polisi semata-mata. Bahkan diberbagai negara Polisi hanya turun berurusan dengan Dunia Pendidikan dan Pengajaran apabila ada demonstrasi/unjuk rasa politis dimana Pelajar dan Mahasiswa tampil dalam kelompok yang terorganisir. Tuntutan masyarakat kepada Polri untuk mampu menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas yang semakin canggih saja sudah penuh kendala terutama karena terbatasnya kekuatan personil. Sementara itu Polisi masih terus dikambinghitamkan karena "tidak mampu" menangani perkelahian pelajar. Rasa muak serta

jenuh anggota Polri di lapangan wajar, karena kenyataannya sangsi penindakan atas para pelaku tindak kekerasan tersebut "terlalu ringan dan sering mengambang".

KENAKALAN REMAJA

Meskipun "juvenile delinquency" ini bersifat mundial/universal, sejalan dengan tulisan-tulisan Aswino terdahulu maka kenakalan remaja di Indonesia dalam dua setengah dasawarsa ini lebih cenderung penulis sebut sebagai "parent & juvenile delinquency" (kenakalan orang tua plus remajanya) karena sikap para Orang tua yang hanya menuntut HAK saja tanpa melaksanakan KEWAJIBAN selaku pengasih-pengasah-pengasuh budi pekerti guna menyerap pengajaran di sekolah anak-anaknya. Kewajiban mengambil rapor, konsolidasi dan konsultasi dengan Guru, serta perkembangan kependidikan dan kepengajaran hanya dilihat dengan sebelah mata serta dengan acuh tak acuh. Kalau anaknya dapat ranking yang hebat karena dirinya, Orang tua yang memang ber-IQ tinggi yang berjasa. Sebaliknya kalau nilai anaknya jelek dan atau tidak naik kelas/tidak lulus maka Gurulah yang "goblok", sekolahnya tidak bermutu, dan sebagainya. Di samping itu banyak Orang tua yang memberikan rangsangan anaknya untuk melanggar aturan sekolah, baik lokal maupun nasional. Misalnya membiarkan anaknya tidak berikat ping-

gang dan tidak memasukkan kemeja seragamnya ke pinggang celananya atau blouse si gadis ke roknya; membiarkan anaknya memakai lipstick/eye-shadow/rouge/nail polish; juga membiarkan anak-anaknya gondrong berlebih, berkuku panjang jorok, dan tidak menegur anaknya mengenakan seragam tanpa identitas sekolahnya. Di kota-kota besar larangan siswa membawa mobil atau sepeda motor tidak hanya banyak dilanggar tetapi datang serta perginya meninggalkan sekolah disertai dengan berbagai demonstrasi pamer "wah" (mempermainkan gas dengan suara knalpot yang superbising, mengopot/mentrail keluar masuk sekolah, dan lain-lain) yang membuat para Guru mengelus dada tapi tetap tak berdaya.

Dalam status sosial para Orang tua yang lebih "sibuk", kecenderungan serba mempersalahkan Guru atau "kambing hitam" lain, semakin tajam. Dan terakhir, kambing hitam itu adalah Polisi. Setiap kali ada perkelahian Polisi dimaki tidak tanggap, tidak becus, dan sebagainya. Padahal siapapun jenuh dan bosan serta geregetan setiap hari antara jam 12.00 - 19.00 sejumlah kekuatan Polri "hanya" siaga untuk menghalau "semut-semut beringas", sebagaimana kita pantau dari handy-talky dan lain-lain. Orang tua yang sibuk tersebut pun tidak tahu bahwa anak-anaknya tidak hanya nakal di sekolah dan ma-

syarakat lingkungannya. "Kesibuk-an"nya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anaknya yang nakal tapi pintar untuk membentuk lembaga "kemanjaan" yang sedikit demi sedikit melahirkan generasi manja (spoiled generation). Kondisi ini lebih banyak nampak di lingkungan Orang Kaya Baru (OKB) dimana para Orang tua miskin pengetahuan tentang kependidikan. Uang dan materi adalah "malaikat"/segala-galanya. Guru sampai Mahaguru anak-anaknya tidak lebih dari pelengkap (complement) dalam proses mengentaskan anak didik. Maka di mata generasi manja ini martabat Guru semakin terinjak, terpojok, dan terlupakan. Perlakuan demikian ini sebenarnya hanya oleh sejumlah kecil Orang tua, akan tetapi pada mereka justru ada "power" yang memungkinkan pelembagaan citra Guru. Sebagian besar murid masih penuh rasa hormat kepada mantan Guru-gurunya meskipun aktualisasinya lebih banyak "non-uang dan non-materiil", tidak seperti mereka yang ber"power". Meskipun demikian kita masih boleh "mongkog" (terharu karena rasa syukur dan bangga) karena di DKI ini sekalipun masih ada Arisan Mahasiswa yang selalu mengundang hadir para mantan Guru SDnya. Dari deskripsi tersebut tidak berlebihan apabila dikemukakan bahwa "kenakalan remaja" di negeri ini sebenarnya lebih tepat disebut "kenakalan orang tua

dan remaja" atau bahkan "kenakalan orang tua".

MASALAH KITA BERSAMA

Munculnya pendapat oleh lima Pejabat di HUT ABRI yang lalu menunjukkan kebenaran statement Kapolda Metro Jaya tahun 1988 bahwa penanggulangan perkelahian antar pelajar tersebut *memang* masalah kita bersama, yang diperkuat oleh berbagai opini Pakar dan atau Media Pers. Kompas dalam tajuknya tanggal 1 Desember 1988 menyatakan: HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN ANAK ADA PADA ORANG TUA. Gubernur KDH Ibukota (B. Buana, 17-12-1988) pun berbicara tentang "perhatian Orang tua yang kurang", yang dua hari kemudian (Kompas, 19-12-1988) dalam upacara penyerahan 400 beasiswa kepada pelajar terpilih tahunan menyatakan bahwa "Perkelahian pelajar sudah tak wajar". Keprihatinan Pak Wiyogo nampaknya harus berlanjut sehingga menganggap perlu adanya "peningkatan pola Ketahanan Sekolah (Terbit, 5-10-1989). Kakanwil Depdikbud DKI Jaya (B. Buana, 29-12-1988) menunjuk sebab kenakalan anak sekolah karena "hanya 25% Pelajar yang bisa ketemu Ibu di rumah". Orang tua oleh Kakanwil Depdikbud telah difokuskan kepada sang Ibu. Agaknya pernyataan ini berbeda visi dengan Prof. Dr. Zakiah Daradjat (Kompas, 21-12-1988) dalam DAM-

PAK IBU DI RUMAH BAGI ANAK. Menurut Prof. Zakiah nakal itu (bahkan) ada baiknya asal masih dalam batas wajar. Dan bicara tentang "wajar" ini dikemukakan, bahwa Ibu yang selalu di rumah dapat menimbulkan kebosanan bagi anak; pendidikan agama yang terlalu CEPAT dan KETAT dapat berdampak negatif yakni menjadi serba takut. Oleh karena itu wajar apabila seorang Ibu bisa 4-5 jam giat di luar rumah.

Berbicara tentang sebab kenakalan maka dalam suatu diskusi di Fak. Psikologi UI (B. Buana, 26-12-1988: PERKELAHIAN PELAJAR DAN SANGSINYA) maka Dr. Sarwono sejalan dengan Prof. Sarlito menunjuk ada 11 sebab universal yang mendorong perkelahian tersebut. Prof. Zakiah Daradjat lebih emperik dan pragmatik dengan menyatakan bahwa sebab utamanya adalah keGALAUAN hidup dan karena kurangnya komunikasi dengan Orang tua. Pakar lain, Suarif Arifin (AB, ANCAMAN PENJARA UNTUK REMAJA?) menekankan bahwa sebenarnya mereka itu hanya butuh penghargaan. Seandainya semua perkelahian itu tergolong tindak kriminal maka kriminolog Dr. Mulyana W. Kusumah dalam KEJAHATAN OLEH KELOMPOK BERUSIA MUDA (Kompas, 15-6-1989) mengemukakan bahwa agresivitas kolektif biasanya mempunyai tujuan lain daripada

kekerasan itu sendiri yakni pemuasan kebutuhan-kebutuhan laten yang ada. Dr. Mulyana selanjutnya menunjuk strategi penanganannya yang mengingat faktor-faktor tipologi kejahatan, pelaku, dan apa yang melatar belakangi, yang penanganannya melalui pendekatan HUKUM serta DIALOGIS. Dr. Mulyana yang menekuni profesi Polisi selanjutnya menambahkan bahwa "karena itu potensi masyarakat dan potensi Polisi yang terbatas, harus dukung-mendukung". Dan dalam mencari sebab musabab ini Kapolda Metro Jaya lebih jauh melangkah, yakni dirasa perlunya ditemukannya MOTIF keributan antar pelajar dan bahkan antar mahasiswa. Itulah sebabnya "perintah operasi" telah diberikan kepada para Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya (Kompas, 5-10-1989, KAPOLDA MINTA AGAR KAPOLRES MENCEGAH PERKELAHIAN PELAJAR). Agaknya sudah tepat waktu untuk mengidentifikasi sebab musabab/motif perkelahian tersebut berikut strategi penanganannya/penanggulangannya.

PERKELAHIAN DAN KEKERASAN.

Perkelahian antar Pelajar/Mahasiswa jelas telah meresahkan masyarakat. Tidak saja para Orang tua tetapi juga masyarakat yang sering terjebak di tempat kejadian perkara (TKP) baik sedang berjalan kaki, naik bus/kendara-

an umum maupun kendaraan sendiri. Tidak sedikit dari mereka terkena lemparan batu, tinju, ayunan balok/besi, dan sebagainya sehingga tidak sedikit yang dihinggapi trauma kekerasan di tempat umum.

Perkelahian antar Pelajar/Mahasiswa bukan satu-satunya yang meresahkan masyarakat. Bahkan tidak tertera dalam daftar Kompas tanggal 26-12-1988 yang memuat

11 KASUS KEJAHATAN MERESAHKAN DI JAKARTA DAN SEKITARNYA TAHUN 1987 dan 1988, yang terdiri dari: penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, pemerasan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan. B. Buana tanggal 20-4-1989 mensinyalir bahwa kejahatan kekerasan di Jakarta makin memprihatinkan sementara hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan. Kejahatan dengan kekerasan itu tidak saja memprihatinkan akan tetapi juga semakin bermodus operandi canggih, sebagaimana pernyataan Pangab dihadapan Mahasiswa PTIK Angkatan XXIV dan XXV tanggal 16-6-1989 dalam tema ceramahnya yang berjudul BENTUK KRIMINALITAS CANGGIH BERMUNCULAN SUSUL-MENYUSUL.

Tidak tercantumnya kebrutalan

perkelahian antar Pelajar/Mahasiswa dalam daftar keresahan tersebut masih disusul oleh kasus kebrutalan lalu-lintas yang dalam kehidupan sehari-hari justru lebih menonjol dan memprihatinkan semua pihak, yang berakumulasi pada kasus-kasus tabrak lari. Kekerasan hampir dapat dipastikan sebagai kecenderungan kalau tidak boleh disebut fenomena sosial atau budaya. Dalam kaitan ini Psikolog UI Drs. Iman Santoso Sukardi (Majalah MATRA No. 37/Agustus 1989 halaman 29 dan seterusnya) menyampaikan butir informasi perihal MUNCULNYA BUDAYA KERAS sebagai berikut:

1. Mengapa manusia yang dianugerahi berbagai kelebihan itu mampu berbuat kejam, keras, dan agresif? Kuncinya pada kemampuan pengendalian diri dan penalaran secara obyektif.
2. Di lain pihak, seseorang yang merasa terancam kedudukannya, harga diri dan prestisenya serta sulit menemukan jalan keluar dari kemelut ini, akan menjadi sangat frustrasi dan mudah terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan.
3. Anugerah kelebihan itu tidak akan berarti kalau kita tidak mampu mengendalikan diri dan mengubah situasi frustrasi melalui penalaran, menjadi situasi pemecahan masalah untuk mencari alternatif-alternatif jalan keluar.

PERAN DIALOG, KOMUNIKASI, DAN KETAHANAN

Jakarta memang bukan Indonesia, akan tetapi hampir seluruh dampak proses pembangunan nasional yang ada di dalamnya dapat dijadikan "barometer" untuk melakukan antisipasi segala jenis kecenderungan, fenomena sosial, dan "budaya baru" yang cepat ataupun lambat akan menjarah kota-kota lain di nusantara ini. Merasuknya ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi/informasi ke seluruh aspek kehidupan bangsa berproses cepat tanpa kenal batasan waktu dan ruang (space). Oleh sebab itu masalah perkelahiran Pelajar/Mahasiswa, juga tindak kekerasan umpama pembunuhan dan kebrutalan berlalu-lintas pun harus ditempatkan dalam visi dan prediksi yang berlingkup nasional, yang penanganan dan penanggulangannya disesuaikan dengan bobot dan stratifikasi hakekat ancaman setempat.

Dari paparan dan berbagai pendapat umum (termasuk para Pakar dan Media Pers) diatas apabila tidak ada unsur politis dan subversi maka satu sisi dari stabilitas Kamtibmas telah berada dalam ancaman berupa benturan, friksi/clash/conflict baik yang terselubung maupun yang terbuka/konfrontatif. Sosok gelombang ancaman timbul dari berbagai rasa galau, frustrasi, tersumbatnya saluran wajar (sublimasi) untuk ber-

tahan hidup, dan kebutuhan laten (rasa harga diri/ingin dimanusiawikan, prestise, ingin diperhatikan).

Arah kebijaksanaan penanggulangannya tidak hanya secara hukum (mulai dari persuasif, preventif, pre-emptif, sampai represif), dialogis dan komunikasi saja, melainkan secara mutlak harus menata Ketahanan Nasional di bidang Sosial-Budaya umpama Ketahanan Mental/Moral, Ketahanan pribadi untuk pengendalian diri untuk tidak bertindak di luar tingkah laku manusia Indonesia yang beradab/berperi kemanusiaan. Penataan tersebut tidak luput dari karakteristik bangsa berikut citranya. Masihkah bangsa India itu arogan, Thailand "lembut bagai sutera", Jepang gigih dengan semangat "bushido"nya, atau Indonesia itu ramah tamah dan bersemangat gotong royong? Atau seperti kata Mochtar Lubis (dalam bukunya MANUSIA INDONESIA) munafik dan boros? Istilah-istilah KISS, Lintas Sektoral, Integral, Integralitas, sampai Kepemimpinan Pancasila sudah teramat sering dikumandangkan oleh para Pembuat Kebijakan/Keputusan, yang melahirkan berbagai program jangka pendek, sedang, dan panjang. Akan tetapi sudahkan kita *menata bak dan kewajiban kita* masing-masing dalam menanggulangi berbagai "masalah dan tanggung jawab kita bersama" seperti perkelahiran Pelajar/Mahasiswa serta Tindak Kekerasan lainnya misalnya?

SECERCAH HARAPAN

Karena rasa kuatir akan terlibat dalam perkelahian massal maka sejumlah keluarga telah "pasang kuda-kuda" dengan penuh rasa was-was dengan antar-jemput khusus, dengan membekali putra-putrinya kemeja atau blouse cadangan (preman) untuk menyelamatkan diri agar tidak terlibat dan atau menjadi korban. Akan tetapi proporsionalakah tindakan tersebut sementara kewajiban mengenakan Seragam Sekolah masih harus dipatuhi? Sejalan dengan kewajiban memasang *label nama* bagi anggota ABRI/SATPAM/KAMTIB/HANSIP/WANRA /Resimen Mahasiswa demi tegaknya disiplin pribadi dan Korsa (corps), tidak perlukah kita wajibkan agar Seragam Sekolah yang kini ada dilengkapi pula dengan label nama Pelajar/Mahasiswa yang bersangkutan? Nampaknya sepele akan tetapi dalam jangka pendek akan memudahkan Guru, Orang tua, Instansi Terkait, dan Aparat Kamtibmas untuk bertindak cepat.

Gagasan yang lebih bersifat darurat tersebut wajib segera dimantapkan dengan langkah-langkah nyata guna menembus kendala mendasar yakni krisis dialog, krisis komunikasi, dan ketidak-tahuan bagaimana berketahanan pribadi. Penataan langkah-langkah faktual tersebut tidak hanya berlaku di Ibukota atau kota-kota besar saja melainkan wajib digarap se-

cara nasional sesuai stratifikasi secara administratif (mulai dari Desa/Kelurahan atau bahkan dari RT—RW, sampai tingkat Pusat) dengan segala pemilihan sesuai bobot permasalahan setempat.

Sejalan dengan dinamika modernisasi yang begitu cepat terpacu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi/komunikasi-informasi, maka setiap "bawahan" (Pelajar sampai dengan Pegawai Tinggi yang masih punya Atasan) mulai berniat terus terang dengan bahasa yang lebih lugas (to the point, zakelijk). Niat berpola komunikasi/berdialog lugas ini sering tersendat oleh kokoh kuatnya budaya/norma/tatanan lama sang Atasan yang serba penuh prosedur feodalistik serta birokratik. Kondisi dialog dan komunikasi yang tersendat ini melahirkan berbagai frustrasi karena tidak dimanusiawikan yang aktualisasinya sering berupa "peledakan" (sikap keras, kasar). Semakin sempit saluran dialog dan komunikasi semakin lebih keras dan kasar, dan bahkan sering penuh keberingasan. Dan manakala jalan berdialog/berkomunikasi sudah "tersumbat" (tiada lagi keterbukaan) sementara bawahan selaku komunikator "belum" berani secara lugas berkonfrontasi/berontak, atau bersikap agresif melawan komunikan, dicarilah kambing hitam sebagai sasaran. Inilah yang oleh Dr. Mulyana W. Kusumah diidentifikasi sebagai

"pemuasan kebutuhan-kebutuhan laten yang ada".

Agaknya semangat keterbukaan yang tulus ikhlas dan bersungguh-

sungguh serta tekad menahan diri secara konsisten benar-benar tiada ternilai harganya untuk dijangkau!



RUANG PUSTAKA

Sitompul, DPM

Polisi dan penangkapan/oleh DPM Sitompul

Bandung : Tarsito, 1985.

118 hlm. ; Illus. : 22 cm.

Buku ini disusun dengan maksud untuk ikut mengisi literatur/bahan bacaan tentang masalah Kepolisian di Indonesia. Bagi Polisi yang sedang berpatroli di jalan-jalan, harus memperhatikan berbagai macam hal antara lain: memperhatikan kerumunan orang, memperhatikan bank, rumah-rumah pejabat penting, lalu lintas dipersimpangan jalan dan lain-lain.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka diperlukan untuk menjalankan hukum pidana materil, guna mencari kebenaran yang hakiki dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Untuk mendapatkan suatu ketrampilan teknik menangkap diperlukan adanya beberapa faktor penunjang:

- a. Latihan-latihan cara menangkap
- b. Adanya teknik-teknik yang baik untuk menangkap
- c. Adanya instruksi/pelatih yang cakap untuk melatih teknik menangkap.

Soesilo, R

Kriminalistik : (Ilmu penyidikan kejahatan) oleh R. Soesilo

Bogor : Politeria, 1976.

x, 179 hlm. ; Illus. : 21 cm.

Penyidikan kriminil dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan itu bertujuan mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran ini perlu untuk menjaga jangan sampai pengadilan menjadi tersesat dan mengambil keputusan yang keliru, sehingga membebaskan orang yang salah atau mempidana orang yang tidak berdosa.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan Polisi, khususnya para petugas penyidik dan pembantu penyidik perlu melengkapi dengan ilmu kriminalistik.

Isi buku ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para penyidik dan pembantu penyidik dalam menunaikan tugas kewajibannya yaitu

dari mulai menerima laporan adanya kejahatan kemudian berturut-turut: pelaksanaan penyidikan di tempat kejadian perkara, pengolahan hasil bekar-bekas yang di dapat di tempat itu, cara pembungkus barang-barang bukti dan pengirimannya kelaboratorium sehingga dapat diperoleh bukti ilmiah yang dibutuhkan.

Karyadi, M

Pembawaan, pengangkutan, pengawalan orang-orang tangkapan tahanan dan nara pidana di Indonesia/oleh M. Karyadi

Bogor : Poletia, 1975.

VII, 151 hlm. ; Illus. : 22 cm.

Pembawaan, pengangkutan dan pengawalan orang-orang tahanan merupakan suatu hal remeh yang oleh kebanyakan orang dilupakan, akan tetapi bagi para petugas penjaga keamanan, utamanya bagi para pegawai Polisi yang menurut undang-undang, khusus dibebani dengan tugas itu, hal tersebut adalah suatu masalah yang tidak sederhana, bahkan suatu hal yang amat penting yang patut diperhatikan dan dipelajari. Kekurangan pengetahuan tentang hal ini dapat menyebabkan mata rantai yang lemah dalam tugas Kepolisian.

Banyak sudah terjadi peristiwa-peristiwa bahwa seorang Tamtama, bahkan Perwira Muda mengawal tahanan sampai orangnya dapat melarikan diri. Hal ini terjadi karena para petugas itu tidak atau kurang mengetahui serta tidak menginsafi akan pentingnya masalah ini. Walaupun tahanan tersebut akhirnya dapat ditangkap juga, tetapi negara telah membuang waktu, tenaga dan biaya yang tidak perlu.

Sebelum membahas hal tersebut di atas terlebih dahulu diuraikan mengenai istilah penangkapan dan penahanan dikaitkan dengan bunyi pasal 9 dari pernyataan umum hak-hak azasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan : "tidak seorangpun boleh dipidana, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang" kemudian dasar-dasar hukum penangkapan dan penahanan yakni baik dengan Surat Perintah maupun tanpa Surat Perintah.

Taktik dan teknik pembawaan dan pengawalan orang-orang tangkapan/tahanan baik lokal maupun antara daerah, di darat, di air maupun di udara dan dalam jarak antara kantor Polisi, kantor kejaksaan, gedung pengadilan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan sebagainya. Diuraikan secara rinci, berikut surat-surat serta peraturan tercantum dalam lampiran buku ini yang merupakan kelengkapan dalam rangka pembawaan, pengangkutan, pengawalan orang-orang tangkapan/tahanan dan nara pidana di Indonesia.